

**Nama : Nabila Anjani**

**NPM : 2213031077**

**Kelas C Pendidikan Ekonomi 2022**

---

## **EKONOMI INDUSTRI**

### **1. Penyebab Lemahnya Dampak Making Indonesia 4.0**

Kebijakan *Making Indonesia 4.0* pada dasarnya dirancang sebagai respons pemerintah terhadap tantangan deindustrialisasi dini dengan mendorong transformasi digital di sektor manufaktur. Namun, implementasinya belum mampu memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan industri prioritas. Jika ditinjau dari perspektif kebijakan industri modern, persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi struktural industri nasional. Banyak pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah, belum memiliki kapasitas teknologi, sumber daya manusia, maupun modal yang memadai untuk mengadopsi teknologi digital secara efektif.

Selain itu, koordinasi kebijakan lintas sektor masih bersifat lemah dan terfragmentasi. Kebijakan industri belum terintegrasi secara kuat dengan kebijakan pendidikan vokasi, riset dan inovasi, pembiayaan industri, serta pengembangan logistik nasional. Padahal, literatur kebijakan industri menegaskan bahwa keberhasilan transformasi industri sangat bergantung pada institusi koordinatif yang mampu menyatukan berbagai instrumen kebijakan dalam satu arah strategis. Akibatnya, *Making Indonesia 4.0* cenderung menjadi agenda sektoral, bukan strategi pembangunan industri yang menyeluruh.

Faktor struktural lain yang menghambat efektivitas kebijakan ini adalah tingginya biaya logistik dan energi serta kompleksitas birokrasi investasi. Kondisi ini melemahkan daya saing industri nasional dibandingkan negara pesaing di kawasan Asia Tenggara, sehingga digitalisasi tidak otomatis meningkatkan produktivitas maupun ekspansi industri.

### **2. Perbandingan dengan Vietnam dan Korea Selatan**

Dibandingkan Indonesia, Vietnam menunjukkan pendekatan kebijakan industri yang lebih pragmatis dan konsisten. Pemerintah Vietnam memprioritaskan industrialisasi berbasis ekspor dengan menarik investasi asing langsung sebagai motor utama pertumbuhan manufaktur. Melalui pengembangan kawasan industri terintegrasi dan kepastian regulasi, Vietnam berhasil mengaitkan investasi asing dengan penguatan rantai pasok domestik.

Sementara itu, Korea Selatan merepresentasikan model *developmental state* yang kuat, di mana negara berperan aktif mengarahkan sektor prioritas melalui dukungan pembiayaan selektif, investasi besar dalam riset dan pendidikan teknik, serta evaluasi kinerja industri secara ketat. Pendekatan ini memungkinkan Korea membangun kapabilitas teknologi domestik secara bertahap dan berkelanjutan

Indonesia berada di posisi antara kedua model tersebut, namun tanpa kekuatan koordinasi seperti Korea dan tanpa efisiensi pasar seperti Vietnam. Hal inilah yang membuat kebijakan industrinya relatif kurang efektif.

### **3. Rancangan Kebijakan Industri Alternatif**

Agar Indonesia mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini, kebijakan industri ke depan perlu diarahkan pada pembangunan kapabilitas industri domestik. Pendekatan kebijakan sebaiknya bergeser dari fokus sektoral ke *activity-based industrial policy*, dengan menitikberatkan pada aktivitas bernilai tambah tinggi seperti pengolahan pangan, manufaktur presisi, dan rekayasa komponen industri.

Pemerintah juga perlu memperkuat program pengembangan pemasok domestik melalui skema *matching grant* dan insentif berbasis kinerja yang mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas produksi. Selain itu, pengembangan kawasan industri harus diintegrasikan dengan pusat riset, pendidikan vokasi, dan infrastruktur logistik agar tercipta ekosistem industri yang saling mendukung.

Dari sisi kelembagaan, pembentukan lembaga koordinatif lintas kementerian yang berfokus pada transformasi industri menjadi penting untuk memastikan konsistensi kebijakan jangka panjang. Dengan kebijakan yang lebih selektif, adaptif, dan berbasis pembelajaran, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat sektor manufaktur secara berkelanjutan.